

MEMAKNAI SISI AKUNTANSI DARI SUMBANGAN KEAGAMAAN MASYARAKAT HINDU BALI

Ni Nyoman Alit Triani
Made Dudy Satyawan

Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Ketintang, Gayungan, Surabaya, 60231
Surel: trianialit8@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7019>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 7
Nomor 2
Halaman 156-323
Malang, Agustus 2016
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
27 April 2016
Tanggal Revisi:
29 Mei 2016
Tanggal Diterima:
27 Juli 2016

Abstrak : Memaknai Sisi Akuntansi dari Sumbangan Keagamaan Masyarakat Hindu Bali. Tujuan penelitian ini adalah memaknai sudut pandang masyarakat Hindu-Bali dalam *piturunan* (iuran bersama untuk pembangunan tempat sembahyang). Hal ini didasari oleh fungsi tempat sembahyang sebagai jembatan komunikasi sepirtual antara Tuhan dan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara dengan bersandar pada paradigma interpretif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya hubungan selaras antara kasta dan kemampuan ekonomi dengan jumlah *piturunan*. Hal ini terjadi karena sifat dari tatana fungsi arsitektur tempat sembahyang yang sangat beragam, mengikuti tingkat kasta. Implikasinya, akuntansi pada *piturunan* memiliki sifat yang lebih kompleks.

Abstract : Interpreting Accounting Side of Balinese-Hindu Society Religious Donations. The dim of this research is to interpret the Balinese-Hindu society view on *piturunan* (colletion of donation for constructing praying place). This is founded by the function of pura or praying plase as spiritual communication bridge between God and human. This research uses interview that is standarized on interpretive paradigm. The results shows that there is linear relationship between castes and economic ability with the *piturunan* amount. This happens due to the order of architecture function that varies respectively with its casies. follow the caste level. The implication of this phenomenon is that accounting used in *piturunan* is more complex.

Kata Kunci: Akuntansi, Sumbangan Keagamaan, Kasta, Sosial Ekonomi

Kehidupan masyarakat Hindu-Bali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pura. Pura merupakan tempat peribadatan bagi masyarakat Hindu Bali. Saat ini, keberadaan pura menjadi semakin sakral dalam kehidupan mereka karena kondisi masyarakat pulau Bali yang mayoritas beragama Hindu. Selain itu, konsistensi masyarakat Bali dalam menjaga adat istiadatnya turut memperkuat posisi pura. Pura merupakan sarana peribadatan bagi umat Hindu dalam usahanya melakukan penyerahan diri dan mendekatkan diri terhadap Sang Hyang Widhi Wasa sehingga dapat meningkatkan kualitas umat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pura kemudian tidak semata-mata hanya menjadi tempat pemujaan kepada sang pencipta, tapi juga menjadi sarana aktualisasi sosial dan bu-

daya masyarakat Bali. Banyak upacara adat diselingi dengan berbagai pertunjukan kesenian seperti aneka sendratari. Selain kesenian, pelaksanaan upacara adat menjadi sarana interaksi sosial yang intens antar masyarakat di pulau Bali (Sugriwa 1956:65). pura sebagai bangunan suci, diharapkan manusia dapat mengembangkan dirinya untuk saling mengenal sesama umat sehingga kerukunan intern umat Hindu dapat terwujud. (Putra 2012).

Dalam setiap pembangunan tempat peribadatan di Bali, semua warga *penyung-sung* akan dikenakan sumbangan yang wajib. Sumbangan tersebut dikenal dengan istilah *piturunan*. *Piturunan* (sumbangan) ini umumnya dibagi rata untuk semua umat *penyung-sung* (jemaat) dari tempat sembahyang tersebut. Oleh karena itu semakin

besar skala pura yang dibangun, jumlah *piturunan* yang dikumpulkan akan semakin besar. *Piturunan* yang dikeluarkan oleh masing-masing umat akan mencerminkan dari kelompok kasta dan strata sosial. Hal tersebut berdampak pada transparansi dan akuntabilitas proyek pembangunan pura tersebut. Selain *piturunan* yang dikenakan, juga akan ada sumbangan yang bersifat sukarela. Sumbangan yang bersifat sukarela ini lebih dikenal dengan istilah dana *punia*. Pada saat awal pembangunan, *penyungsong* akan membentuk panitia proyek yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Fungsi bendahara adalah mengelola keuangannya dengan baik dan akan mempertanggungjawabkannya secara berkala kepada para warga *penyungsong*. Oleh karena itu, penyampaian laporan keuangan tentunya akan menerapkan praktik akuntansi yang sederhana.

Peran akuntansi sebagai *tools* pada lingkup keagamaan untuk entitas-entitas peribadatan sebenarnya hadir dalam bentuk kombinasi dengan agama (spiritual), sistem nilai dan transenden. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Badu dan Hambali (2014) yang menyatakan bahwa sebagai entitas, masjid menggunakan pelaporan akuntansi yang dananya berasal dari sumbangan masyarakat sebagai sumber keuangannya, seperti; donasi, *zakat*, *infaq*, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya. Oleh karena itu, akuntansi menjadi penting untuk melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaporan keuangan tersebut. Perlunya penyajian yang akuntabel dan transparan dalam pelaporannya, mengacu entitas mampu berjalan dengan baik dan bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat. Praktik akuntansi akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Praktik akuntansi pada lembaga-lembaga keagamaan atau entitas nirlaba lainnya merupakan sesuatu yang belum lazim, namun krusial untuk menegajawantahkan proses transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya kepercayaan umat. Mereka telah tulus mendarmakan harta bendanya untuk kepentingan bersama. Walaupun tidak lazim, penelitian praktik akuntansi pada lembaga keagamaan seperti gereja banyak dilakukan oleh beberapa peneliti akuntansi. Salah satu peneliti (Irvine 2005) menyimpulkan bahwa pendeta dan orang awam percaya akuntansi tidak mengganggu agenda suci yang dikerjakan oleh gereja. Sebaliknya,

akuntansi merupakan bagian penting yang terintegrasi dengan kepentingan gereja demi mencapai misi kudus karena temuan ini berkepentingan dengan masyarakat sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik).

Akuntansi akan mempermudah pengelolaan manajemen terutama dalam pengelolaan keuangan, baik untuk institusi yang bersifat *profit oriented* institusi *nirlaba*. Hal ini sejalan dengan penelitian Huda *et al.* (2014) menyatakan bahwa prioritas masalah pengelolaan wakaf terletak pada wakil yang menyerahkan harta wakaf bukan melalui lembaga pengelola wakaf. Solusi yang ditawarkan menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan wakaf dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, sejalan dengan pemahaman yang ada perlu dicari bagaimana umat *penyungsong* dari sebuah pura memaknai *piturunan* atau sumbangan dilihat dari perspektif perbedaan kasta dan strata ekonomi. Serta bagaimana makna akuntansi *piturunan* sebagai bagian dari kegiatan pembangunan pura di Bali.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif non-positivistik dengan paradigma interpretif mendekati realitas yang sesungguhnya (Chua 1986). Penentuan paradigma interpretif didasarkan pada cara yang diambil oleh penulis dalam pengumpulan data-data di lapangan. Burrell dan Morgan (1979) menggambarkan sifat interpretif sebagai paradigma yang memiliki karakteristik untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial yang tidak terlepas dari kacamata personal yang terlibat langsung dalam sebuah proses sosial. Muhadjir (2000:119) berpendapat bahwa paradigma interpretif melakukan aktivitas yang mencari makna, bukan hukum, untuk memahami bukan untuk mengonstruksi teori. Pendekatan interpretif menjadikan ilmu sosial cenderung menjadi *nominalis*, *anti-positivis* dan *ideografis* (Burrell dan Morgan 1979:28). Status ontologi dunia sosial selalu dapat dipertanyakan dan problematis. Realitas sosial dengan sendirinya merupakan hasil dari pemaknaan dan pemahaman individu serta bagaimana ia membentuk makna tersebut. Dengan demikian, realita sosial pasti bermakna majemuk, berubah atau bertahan,

tergantung pemaknaan individu.

Proses menggali dan mengumpulkan data dari informan dilakukan dengan teknik wawancara yang mendalam (*in depth interview*) dan peneliti sebagai partisipan. Dari data yang terkumpul, peneliti membuat kompilasi tematik. Kemudian, data dipilih ke dalam sub-sub tema sesuai dengan tema umum penelitian. Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk melakukan pemahaman ke dalam alam kesadaran subjek (*contemplating the content of mind*) yang berupa aktivitas mengingat (*remembering*), meresapi (*perceiving*), dan mengingini (*desiring*). Ketiga jenis aktivitas kesadaran tersebut memiliki keterarahan (*directedness*) pada tema penelitian. Cara yang dilakukan penulis adalah melakukan penyelidikan dengan mendatangi subyek yang hendak diteliti dengan *setting* yang alami. Penulis datang ke tempat dimana subjek yang hendak diteliti yaitu komunitas masyarakat Hindu yang berdomisili di pulau Bali. Peneliti mengambil area informan pada kabupaten Tabanan, Singaraja dan Kotamadya Denpasar, untuk selanjutnya dilakukan proses mengamati dan berinteraksi dengan aktor-aktor sosial dalam waktu relatif panjang, yaitu selama 20 hari efektif. Rentang penelitian adalah dari bulan desember 2015 sampai dengan bulan maret 2016. Setelah memperoleh data yang cukup dan tepat, peneliti menganalisis dengan metode yang tepat, dan akhirnya melakukan tahapan menginterpretasikan hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan akuntansi dalam konteks sosial dan praktik budaya yang kian beragam semakin mengukuhkan eksistensi paradigma kualitatif. Kemampuannya menghasilkan produk analisis yang mendalam selaras dengan *setting*nya. Beberapa metode penelitian berbasis kualitatif seperti; analisis wacana, studi kasus, semiotik dan etnografi, kini mulai dilirik para ilmuwan dan peneliti akuntansi. Menyadari akan pentingnya manfaat multiparadigma dalam riset akuntansi peneliti mencoba menyelami metode pendekatan yang berbeda dengan pendekatan-pendekatan antropologi yaitu pendekatan *interpretive* dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran khusus instansi kebudayaan yang diteliti. Setiawan (2011) juga menyatakan akuntansi merupakan ilmu pengetahuan yang bermukim di ranah ilmu sosial. Pendekatan pengembangan keilmuannya mengacu pada paradigma ilmu

sosial. Burrell dan Morgan (1979:17) menguraikan adanya dua dimensi asumsi tentang *nature of society* untuk mengembangkan ilmu sosial. Dua dimensi tersebut adalah sosiologi regulasi dan sosial perubahan. Dari dua dimensi dengan garis kontinum tersebut, Burrell dan Morgan (1979:21) menawarkan adanya empat paradigma ilmu sosial, yaitu 1) fungsionalis atau yang lebih dikenal dengan positivis, 2) interpretif, 3) radikal humanis, dan 4) radikal strukturalis.

Bentuk pertanggungjawaban aktivitas keuangan kepada publik (donatur) akan selalu dijaga oleh lembaga baik yang *profit oriented* maupun *non profit oriented*. Semua aktivitas yang berjalan dalam semua lembaga akan dilaporkan dalam bentuk laporan aktivitas. Laporan aktivitas akan memenuhi tujuan akuntabel, dimana tujuan utama dari laporan aktivitas adalah menyediakan informasi-informasi tentang pengaruh transaksi dan peristiwa keuangan lain yang mengubah jumlah dan aset neto. dan bagaimana penilaian dan alokasi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program kerja atau jasa yang dilakukan. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran. (IAI 2011: 45.19). Pertanggungjawaban ini akan diwujudkan dalam transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya. Hal ini didukung dengan penelitian Badu dan Hambali (2014) menunjukkan bahwa realitas sebagian masyarakat masih menganggap laporan keuangan atas sumbangan keagamaan tidak perlu dilaporkan. Badu dan Hambali juga menemukan minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaporan keuangan, masih terbatasnya perhatian pemerintah terhadap organisasi masjid (keagamaan), sumber daya manusia yang belum kompeten dalam mengelola keuangan, serta diperlukannya kajian-kajian islami secara menyeluruh.

Konsep *dana punia* yang dikeluarkan oleh umat Hindu di Bali didasari oleh filosofi ajaran *Tat Twam Asi*, yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita semua sama. *Tat Twam Asi* adalah kata-kata dalam filsafat Hindu yang mengajarkan kesosialan yang tanpa batas karena diketahui bahwa "ia

adalah kamu", "saya adalah kamu" dan "segala makhluk adalah sama" memiliki *atman* yang bersumber dari Brahman. Manusia dalam hidupnya memiliki berbagai macam kebutuhan hidup yang dimotivasi oleh keinginan manusia yang bersangkutan (Mimbar Hindu No date: 19). Pandanglah setiap orang seperti diri kita sendiri yang memerlukan pertolongan, bantuan atau perlindungan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang sejati, seperti diamanatkan dalam kitab suci Veda, "*vasudhaivakutumbakam*" (semua makhluk adalah bersaudara). Manusia merupakan makhluk sosial dalam arti manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain. Apabila umat menghayati dan memahami ajaran *Tat Twam Asi*, sudah semestinya akan terjalin hubungan yang baik antar sesama. Jangan sampai kita sebagai manusia saling menyakiti, melakukan tindakan anarkis yang merugikan orang lain, atau bahkan tega membunuh sesama manusia demi menunjukkan superioritas tertentu. Hendaknya kita saling menolong dan memberikan perlindungan terhadap sesama, bila menjadi orang kaya, kita wajib membantu orang-orang yang miskin, bila menjadi orang yang kuat bantulah orang-orang yang lemah. Dengan demikian, kehidupan yang harmonis dapat terwujud. Hal ini merupakan implementasi dari ajaran *Tat Twam Asi*. Konsep ini mendasari semua umat Hindu dalam melaksanakan *punia* dan *piturunan* yang di berikan dalam semua kegiatan *yadnya* baik manusia *yadnya* dan Dewa *Yadnya*. Hal ini juga di dukung oleh pernyataan dari Bapak Putu sebagai *Pinandita* Pura Pande di Tabanan:

"Seperti yang sudah di atur dalam ajaran Hindu dan filsafat *Tat Twam Asi*, semua umat yang menyungung dari suatu pura akan secara tulus dan ikhlas dalam memberikan *piturunan* maupun *punia*, baik dalam upacara *piodalan* maupun dalam hal pemugaran pura. *Piturunan* dan *punia* yang di berikan merupakan wujud dari filsafat *Tat Twam Asi* dan juga sebagai perwujudan manusia sebagai makhluk sosial".

Selain dari ajaran *Tat Twam Asi* yang dijelaskan di atas, juga di jelaskan dalam sarasamucaya sloka 169 juga mengenai sumbangan *dana punia* atau *piturunan*,

yaitu sebagai berikut :

"*na mata na pita kincit kasyacit pratipadyate, danapathyodano jantuh svakar-maphalamacnute*"

artinya :

"Barang siapa yang memberikan dana *punia* maka ia sendirilah yang akan menikmati buah (pahala) dan kebajikannya itu".(Wararuci 2016).

Hal ini juga di dukung dengan kitab Bhagavad Gita XVII.20

"*Daatavyam iti yad daanam diyate nupakaarine, desa kala ca paatre ca tad daanam saatvikam smrtam*".

Maksudnya: Dana *punia* (sumbangan/*piturunan*) yang diberikan dengan tulus ikhlas dengan tidak mengharapkan hasilnya. Hal itu diyakini sebagai kewajiban suci dan diberikan kepada orang yang tepat (*paatra*). Pemberian yang demikian itu disebut *Satvika Daana* (Wiyana 2012).

Ajaran agama sudah mengatur semua kegiatan *piturunan* dan *punia* yang di berikan oleh *penyungung* pura. Hal ini di dukung oleh pernyataan dari Ibu Cok Sri: "Bila ada kegiatan perbaikan pura baik secara keseluruhan maupun sebagian saya akan berusaha untuk memberikan *punia* di samping *piturunan* yang harus saya bayar. Untuk besaran *piturunan* akan di kenakan sama pada masing-masing kepala keluarga. Dengan memberikan *punia* dalam pembangunan pura ini sebagai wujud sembah dan bakti saya sama Ida Shang Hyang Widhi, yang secara tulus ikhlas". Pendapat tersebut turut didukung oleh sesama *penyungung*, yaitu dari Bapak Gusti Made yang menyatakan:

".....disamping saya membayar *piturunan*, saya akan selalu berusaha untuk melaksanakan *punia* baik berupa uang maupun barang. Saya lebih suka *mempunia* dalam bentuk barang, seperti kayu dan air minum dalam kardus kartonan untuk para tukang. Dengan saya melakukan *punia* saya akan mendapatkan

keberkahan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. Semakin besar pura yang di bangun semaiKn besar dana yang di butuhkan, sehingga saya selalu berusaha untuk memberikan *punia* sebagai *yadnya* saya”.

Konsep bangunan pura di Bali mengacu pada pemahaman umat Hindu Bali terhadap Alam dan ajaran agama Hindu. Konsep pembuatan arsitektur Pura mengacu pada Sastra/Lontar Asta Kosal-Kosali yang di dalamnya terdapat falsafah perwujudan arsitektur *Tri Hita Karana*, *Panca Maha Bhuta*, dan *Nawa Sanga*. Ketiga falsafah tersebut mengandung pemahaman mengenai alam yang dikaitkan dengan kepercayaan umat Hindu, seperti keterlibatan pengaruh dewa-dewa pada setiap penjuru mata angin. Selain itu, bangunan pura juga memiliki satuan ukur bangunan yang mengacu pada ukuran anatomi manusia itu sendiri. Hal tersebut mengacu pada logika manusia sebagai pengguna bangunan. Pemahaman tentang alam juga memengaruhi struktur pura yang dilihat dari denahnya. Pembagian halaman pura ini, didasarkan atas konsepsi makrokosmos (*bhuwana agung*). Konsep tersebut adalah pembagian pura atas 3 (tiga) bagian (halaman) yaitu adalah lambang dari “triloka”, *bhurloka* (bumi), *bhuvaaloka* (langit) dan *svaaloka* (sorga).

Pada umumnya, struktur atau denah pura di Bali dibagi atas tiga bagian, yaitu: *Jabapura* atau *ja ba pisan* (halaman luar), *jaba tengah* (halaman tengah) dan *jeroan* (halaman dalam). Di samping itu, ada juga pura yang terdiri dari dua halaman, yaitu: *ja ba pisan* (halaman luar) dan *jeroan* (halaman dalam). Selain itu terdapat pula pura yang terdiri dari tujuh halaman (tingkatan). Pembagian pura atas 2 (dua) halaman (tingkat) melambangkan alam atas (*urdhaa*) dan alam bawah (*adhaa*), yaitu *akauadan pativi*. Sedangkan pembagian pura atas 7 bagian (halaman) atau tingkatan melambangkan “*Saptaloka*” yaitu tujuh lapisan/tingkatan alam atas, yang terdiri dari: *bhurloka*, *bhuvaaloka*, *svaaloka*, *mahaoka*, *janaloka*, *tapaloka* dan *satyaloka*. Bangunan pura yang terdiri dari satu halaman adalah simbolis dari “*ekabhuvana*”, yaitu penunggalan antara alam bawah dengan alam atas. Pembagian halaman pura yang pada umumnya menjadi tiga bagian itu adalah pembagian horizontal sedang pembagian (*loka*) pada *pelinggih*

adalah pembagian yang vertikal. Pembagian horizontal itu melambangkan prakati (unsur materi alam semesta) sedangkan pembagian yang vertikal adalah simbolis *puruaa* (unsur kejiwaan/spiritual alam semesta). Penunggalan konsepsi *prakati* dengan *puruaa* dalam struktur pura adalah merupakan simbolis dari pada “*super natural power*”. Semua kasta yang ada di pulau Bali akan membangun pura sebagai tempat pemujaan akan memiliki tujuan yang sama (Putra 2012).

Di samping menggunakan sastra/lontar Asta Kosala-Kosali, pembangunan pura juga akan menggunakan *Desa Kala Patra*. Penggunaan istilah *Desa Kala Patra* populer dikalangan masyarakat Bali. Konsep *Desa Kala Patra* yang dipahami pada umumnya tidak seperti pengertiannya dalam pustaka suci seperti *Bhagavad Gita* dan *Sarasamuscaya*. Umumnya *Desa Kala Paatra* itu dipahami sebagai pedoman menerapkan agama Hindu dan budaya Bali yang dijiwai agama Hindu. *Desa* diartikan tempat, *Kala* waktu dan *Patra* keadaan. Demikianlah pemahaman *Desa Kala Patra* umat Hindu pada umumnya di Bali. Tapi dalam kaitannya dengan *Desa Kala Patra* dalam *Bhagavad Gita* dan *Sarasamuscaya* sudah sangat jelas artinya, yaitu orang yang seyogianya diberikan dana *punia*. Sedangkan untuk menyukkseskan pengamalan agama atau dharma sudah sangat jelas dinyatakan dalam *Manawa Dharmasastra* VII,10 ada lima dasar pertimbangan agar pengamalan agama atau dharma sukses.

Dalam sloka Manawa Dharmasastra VII.10 terdapat istilah *Dharmasidhiartha* yang memiliki arti suksesnya tujuan dharma atau agama. Ada lima dasar pertimbangan yang dinyatakan dalam sloka tersebut yaitu *Iksha*, *Sakti*, *Desa*, *Kala* dan *Tattwa*. *Iksha* artinya pandangan masyarakat, *Sakti* kemampuan masyarakat, *Desa* aturan rohani yang berlaku setempat, *Kala* artinya waktu, dan *Tattwa* artinya kebenaran Weda. Maksudnya *Tattwa* kebenaran Weda itulah yang diterapkan sesuai dengan *Iksha*, *Sakti*, *Desa* dan *Kala*. Hal ini menyebabkan bentuk luar tradisi beragama Hindu berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Pengertian *Desa Kala Patra* menurut Sloka Bhagavad Gita XVII.20 di atas sangat berbeda dengan pengertian umum. Dalam Bhagavad Gita XVII.20 dinyatakan bahwa *Desa Kala Patra* sebagai pedoman untuk berdana *punia*. Dana *punia* yang benar dan baik itu disebut *Satvikadaana*. Dana *punia*

yang benar dan baik itu harus sesuai dengan petunjuk rohani yang berlaku di tempat tersebut. Petunjuk rohani yang berlaku setempat itulah disebut *Desa*. Sedangkan *Kala* artinya dana *punia* yang benar itu dilakukan pada waktu *Satvika Kala*. Waktu *Satvika* adalah saat masih pagi. Sedangkan *Patra* artinya dana *punia* itu harus diberikan pada orang yang tepat dan baik. Apabila diberikan pada orang yang tidak baik dan tidak tepat disebut *Tamasika Dana*. Dalam Bhagavad Gita XVII.22 orang yang tidak tepat itu disebut *Apaatra*.

Makna yang berbeda diartikan oleh (Suryono dan Carrisa 2015) dimana konsep adaptabilitas terhadap tempat, waktu dan situasi harus dipertimbangkan dalam perilaku/tindakan seseorang dan juga pada konteks arsitektur, yang dapat memberi dampak tertentu. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Dewa yang menyatakan:

“...dalam tatanan pura dan cara pembagian *piturunan* yang diwajibkan dalam sebuah pembangunan pura di masing-masing daerah akan memiliki konsep yang berbeda-beda, di samping pengaruh karakteristik suatu daerah, beda kasta juga akan memengaruhi besar kecilnya *piturunan* yang akan dibayarkan oleh masing-masing kepala keluarga yang merupakan *penyungsong* pura tersebut. tergantung dari *desa kala patra*nya, karena setiap daerah memiliki budaya dan adat yang berbeda”.

Pendapat Pak Dewa juga dibenarkan oleh Pak Ketut yang menyatakan:

“...pembagian *piturunan* yang biasanya diterapkan di desa saya atau umumnya di Singaraja dengan desa yang ada di sebelahnya memiliki cara-cara pengumpulan yang berbeda. Di tempat saya, pada saat pembangunan sebuah pura untuk keluarga besar biasanya kami urunan uang, tetapi di desa tetangga akan membagi *piturunan* tersebut ke dalam bentuk bahan bangunan seperti urunan pasir, bata dan semen yang di tentukan jumlahnya oleh masing-masing ketua panitia, dan akan dicatat oleh bendahara”.

Akuntansi sumber dana pura dalam pelaksanaan pembangunan pura.

Etimologi asal kata “Pura” di Indonesia berasal dari konsonan kata terakhir dari bahasa Sanskerta (*-pur, -puri, -pura, -puram, -pore*) yang memiliki arti “kota” atau “benteng”. Benteng dalam hal ini dapat diartikan sebagai tembok untuk membendung pengaruh-pengaruh adharma (kejahatan, keburukan) yang dapat memengaruhi dharma (kebaikan, kebajikan) pemeluk agama hindu. Pura menjadi tempat suci untuk memuja kebesaran Tuhan Yang Maha Esa guna membentengi umat hindu agar mereka tetap berpegangan kepada ajaran-ajaran agamanya dan memperoleh kekuatan suci dari Ida Shang Hyang Widhi serta tidak mudah terpengaruh oleh adharma.

Pelaksanaan pembangunan dan renovasi tempat sembahyang atau Pura pada masyarakat Hindu di Bali pada umumnya pembiayaannya bersumber dari iuran dan sumbangan dari para umat pemilik (*penyungsong*) pura tersebut, yang umumnya merupakan bagian dari silsilah keturunan sebuah keluarga besar. *Penyungsong* pura umumnya dengan jumlah kepala keluarga (KK) yang besar dengan kisaran jumlah sembilan sampai sepuluh KK. Perlakuan terhadap pengenaan *piturunan* bagi masing-masing kepala keluarga dikenakan sumbangan yang jumlah nominalnya sama dalam artian total keseluruhan biaya dari pembangunan pura akan dibagi sama rata untuk seluruh kepala keluarga. Jumlah sumbangan yang dibutuhkan tersebut ditetapkan melalui penghitungan besaran estimasi biaya-biaya yang akan dikeluarkan sampai dengan penyelesaian pembangunan atau renovasi bangunan pura tersebut. Bagi kepala keluarga yang kondisi keuangannya minim, apabila bentuk dari sumbangan yang diwajibkan berupa uang, maka akan menambah beban biaya hidup untuk keluarganya. Untuk menghindari timbulnya hal tersebut, maka kebijakan yang diputuskan pada rapat kelompok *dadia* memperkenankan masyarakat untuk menyumbang secara sukarela dalam bentuk lain, yang dapat dipersamakan dengan nilai nominal uang, antara lain sumbangan berupa tenaga sebagai tukang dan atau buruh bangunan jika umat tersebut memiliki keahlian konstruksi bangunan pura sehingga kontribusinya dapat dipersamakan dengan biaya sewa tukang dan atau buruh bangunan. Contoh bentuk sumbangan lainnya tersebut juga akan di-

lakukan pencatatan sederhana sebagaimana sumbangan dalam bentuk uang yang berasal dari individu kepala keluarga ataupun dari pihak lain.

Pembangunan pura juga akan disusun suatu kepanitian yang dibentuk berdasarkan putusan hasil rapat *dadia* atau pura dimana telah ditentukan dan ditunjuk orang-orang yang berwenang dan bertugas mengelola kebutuhan dari kegiatan pembangunan tersebut, dengan jangka waktu sampai dengan penyelesaian tidak hanya berhenti pada fisik bangunan tapi juga sarana lain sebagai pelengkap non fisik dari bangunan sebuah pura, seperti dilakukannya upacara keagamaan *ngeteg linggih* yaitu sebuah upacara simbolis mengisi dan mensyukuri kesucian bangunan baru sebuah pura. Kepanitian tersebut mengangkat salah satu dari keluarga besar mereka sebagai bendahara yang bertugas sebagai pengelola keuangan yang bersumber dari *piturunan* umat dalam pembangunan pura tersebut.

Bendahara akan mengklasifikasi pengeluaran menurut sifat biayanya seperti bahan material bangunan, biaya upah tukang dan buruh bangunan, serta biaya lainnya termasuk biaya upacara *ngeteg linggih*. Biaya pengeluaran yang relatif paling besar dalam pembangunan pura umumnya terletak pada kebutuhan material bangunan termasuk ukiran-ukiran yang dipahat dari kayu berkualitas tinggi dalam pembuatan pelinggihnya. Pada bangunan sebuah pelinggih yang telah terukir berkisaran dengan nilai ± 4 juta untuk ukiran sederhana dan bahan yang kayu yang bersifat madya. Pembuatan pelinggih ini umumnya menggunakan kayu cempaka, kayu majegau dan atau kayu pohon cendana atau gaharu. Jika pembuatan pelinggih dengan menggunakan kayu majegau harga dari pelinggih ini berkisaran sepuluh sampai lima belas jutaan untuk satu *pelinggih*.

Pengeluaran terbesar kedua umumnya ada pada biaya upah tukang dan buruh bangunan. Semakin rumit dan kompleks bangunan pura tersebut akan menghabiskan biaya upah tukang dan buruh yang semakin besar. Selain biaya upah tukang dan buruh, tiap hari kerja juga akan mengeluarkan biaya makan dan minum bagi tukang, buruh, dan kepala keluarga yang membantu dalam kegiatan pembangunan pura tersebut.

Penyajian sumbangan yang diberikan oleh warga *penyungsurung* dari suatu pura akan memiliki kebijakan penyajian yang

berbeda-beda, dan jumlah sumbangan-pun akan berbeda-beda. Sumbangan yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota keluarga *penyungsurung* dari pura akan sama. Umumnya, sumbangan untuk pura yang berasal dari kasta brahmana akan lebih besar daripada kasta yang lain. Hal tersebut berdampak pada penyajian laporan keuangan yang akan lebih kompleks dan lebih lengkap. Kasta yang ada di Bali (lebih umum disebut dengan catur wangsa) terdiri atas Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra. Umumnya pengelompokkan catur wangsa ini sesuai dengan bakat/kualitas manusia dan kerjanya. Orang yang memiliki bakat atau kualitas yang bekerja di bidang pelayanan ke Tuhan mereka disebut Brahmana. Sementara itu orang yang memiliki bakat di bidang pemerintahan disebut Ksatria. Orang yang memiliki bakat di bidang perekonomian atau perdagangan disebut dengan Waisya. Orang yang mempunyai bakat dalam bidang pelayanan disebut Sudra. Keluarga yang memiliki kasta brahmana akan memiliki tempat pemujaan yang lebih kompleks karena mereka memiliki pemahaman yang lebih tinggi dalam pelayanan ke Tuhan, sehingga tempat pemujaan mereka akan lebih lengkap. Penyajian laporan sumbangan ini akan menggunakan PSAK No.45 yang mengatur pelaporan Keuangan organisasi nirlaba yang diterbitkan oleh IAI. PSAK No. 45 yang menjadi karakteristik untuk entitas nirlaba ini menyatakan bahwa sumber daya entitas berasal dari para penyumbang dengan tidak mengharapkan adanya hasil, imbalan atau keuntungan komersial.

Contoh akuntabilitas pengelolaan keuangan yang bersumber dari sumbangan berbasis agama secara resmi telah diatur oleh Pemerintah Indonesia dalam PER DJP No.15/PJ/2012 tentang Badan/Lembaga yang disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima Zakat atau Sumbangan, seperti keberadaan Badan/Lembaga Amil Zakat (BAZ/LAZ) bagi umat muslim, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI) bagi umat Kristen, dan Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) bagi umat Hindu dengan tujuan antara lain mendorong umat dalam menjalankan kewajiban agama yang sifatnya wajib dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dengan dukungan pemerintah dalam memberikan fasilitas perpajakan (*deductible*) atas zakat atau sumbangan keagamaan tersebut (Satyawan dan Venusita 2014).

Dalam proses pembangunan pura tersebut, laporan penerimaan dana dan pengeluaran dana yang diperoleh dari sumbangan *penyungsong* yang telah berkeluarga, ataupun yang berasal dari luar keluarga besar, tetap akan selalu dilaporkan pihak bendahara kepada semua keluarga *penyungsong* pura. Beberapa tahun belakangan ini terjadi fenomena perubahan perilaku masyarakat yang peduli (*awareness*) terhadap keterbukaan pengelolaan dana sumbangan, sehingga kecenderungan dari para penyumbang menginginkannya adanya informasi mengenai seberapa besar jumlah dana yang terkumpul dan berapa besar peran dari *piturunan* yang mereka kontribusikan dapat membantu pembangunan pura tersebut. Para penyumbang akan memerlukan penjelasan dalam pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, akuntansi menjadi sangat diperlukan dan juga relevan digunakan untuk memenuhi prinsip akuntabel dan transparan pada setiap kegiatan pembangunan atau renovasi pura yang melibatkan lebih dari satu keluarga. Sehingga, disarankan dalam penyampaian laporan keuangannya menggunakan penyajian PSAK 45 “akuntansi organisasi nirlaba” yang menyajikan sumber dana yang berasal dari para penyumbang.

Laporan keuangan pembangunan pura disusun dengan tujuan untuk melaporkan posisi keuangan sampai waktu tertentu yang ditujukan untuk semua keluarga besar, yang akan dilaporkan kurun waktu tertentu, yang umumnya dilaporkan setiap minggu sekali oleh bendahara kepada semua keluarga besar. Format dan terminologi harus dipilih untuk menyesuaikan dengan pemahaman anggota pura selain memfokuskan perhatian pada pengeluaran dalam pembangunan pura tersebut. Laporan keuangan ini di buat untuk membantu para anggota keluarga yang ingin mengetahui seberapa besar jumlah pengeluaran yang sudah terealisasi selama periode pembangunan. Biasanya informasi ini lebih mudah dipahami oleh anggota keluarga dalam bentuk narasi dibanding dalam bentuk neraca.

Menanggapi konsep tersebut, secara realitas hal ini terlihat dari pemahaman Ibu Widani. Ibu ini adalah bendahara dalam pembangunan pura di sebuah desa pada kabupaten Tabanan yang memiliki sedikit pengetahuan mengenai akuntansi karena beliau adalah siswi lulusan SMK jurusan Akuntansi, menyatakan :

“Peran serta dari keluarga besar *penyungsong* pura akan berpengaruh besar dalam proses pembangunan pura. Sumber dana yang ada sebagian besar dari *piturunan* dan dana *punia* sukarela dari semua anggota keluarga besar *penyungsong* pura tersebut. proses pengumpulan *piturunan* akan berbeda-beda caranya tergantung dari kesepakatan semua anggota keluarga. Saya sebagai bendahara akan membuat catatan sederhana terperinci dan melaporkan semua pengeluaran dan penerimaan di setiap akhir pekan diadakannya rapat kepada semua umat *penyungsong*”.

Argumen beliau di atas menunjukkan gambaran bagaimana pentingnya menjaga kepercayaan atas proses pengumpulan sumber dana dalam pembangunan tersebut. Hal ini penting mengingat sumbangan yang dikelola dalam pembangunan dengan tujuan membangun tempat ibadah atau pura memiliki makna religius pertanggungjawaban vertikal pihak panitia dengan Tuhannya. Hal ini juga memiliki relevansi dengan simbol agama dan budaya yang di anut masyarakat Bali, dan di dukung dengan pernyataan Pak Nengah sebagai pemangku pura mengemukakan pendapatnya:

“Adat kebiasaan masyarakat Bali mengajarkan kepada kita melalui konsep *menyama braya*, yang dimana *menyama braya* adalah konsep dimana kita semua akan menanggung semua kegiatan baik suka dan duka yang terjadi dalam keluarga besar. Dan sebagai satu pertanggungjawaban kepada manusia dan kepada Ida Sang Hyang Widhi sesuai dengan filsafah *Tat Twan Asih*”.

Dalam pembangunan pura, para *penyungsong* akan memiliki tanggung jawab yang sama besar bagi semua kepala keluarga. Perhitungan ini diperoleh dari semua pengeluaran yang ada dibagi rata untuk semua kepala keluarga. Pemahaman *menyama braya* ini akan menjadi poros dalam mengarahkan pemikiran keluarga besar untuk memikul semua beban dan sebagai sembah bakti mereka pada leluhur mereka dan Ida Sang Hyang Widhi.... oleh karena itu

mereka akan dengan suka rela dan tanpa pamrih dalam melaksanakan semua kegiatan pembangunan tersebut, yang akan menggambarkan sembah bhakti mereka kepada para leluhur dan Ida Sang Hyang Widhi.

Proses pengumpulan sumber dana yang ada akan menjadi tolak ukur dalam proses pemugaran seluruh atau sebagian dari pura tersebut. Pada umumnya proses pembangunan pemugaran biasanya dengan pelaksanaan pemugaran secara keseluruhan. Proses pengumpulan dana tersebut akan beragam dari setiap keluarga besar.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Cok Rai:

“Dalam proses pembangunan pura di tempat kami, sebagian besar pendanaan yang ada umumnya di keluarkan dari besaran *piturunan* dari keluarga besar, dan ada sedikit pembiayaan yang diperoleh dari *punia* warga yang secara suka rela.”

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh bapak Gusti:

“..... di tempat saya, pada saat pembangunan pura besaran *piturunan* yang di kenakan di masing-masing kepala keluarga akan di tetapkan sama, namun jika masing-masing kepala keluarga ingin melakukan *punia* mereka diijinkan untuk memberikan sumbangan apa pun dan sebesar apapun. Di samping dari nilai besaran *piturunan* yang dibayarkan untuk masing-masing kepala keluarga biasanya kami juga mendapatkan bantuan dana dari pihak luar yang secara sukarela memberikan bantuan”

Begitu juga menurut pak Made menyatakan sebagai berikut:

“Pada saat proses pemugaran pura di tempat saya biasanya kami menyiapkan dari dua sampai tiga tahun sebelum pelaksanaan pemugaran. Karena kami berasal dari golongan menengah, kami akan mempersiapkan lebih lama dengan cara proses menabung. Proses menabung ini untuk mengurangi beban kami, kami

akan menghitung berapa kisaran biaya yang dikeluarkan pada proses pembangunan tersebut. Kami akan mengangkat seorang bendahara, bendahara tersebut akan mengumpulkan uang tabungan kami dan di tabungkan di lembaga perkreditan desa kami. Setiap lima belas hari sekali pada saat purnama (bulan penuh) dan *tilem* (bulan mati), selesai melakukan persembahyangan kami akan melaksanakan rapat dan semua kepala keluarga akan menabung untuk uang kas. Proses menabung tersebut besarnya tidak di atur tergantung dari kemampuan semua anggota keluar, tentunya kami melakukan dengan iklas dan dengan niat yang suci. Bendahara akan melaporkan jumlah tabungan keseluruhan setiap diadakan rapat pada saat purnama dan *tilem* tersebut”.

Realitas Akuntansi dan Transparansi Sebagai Aksentuasi Budaya.

Beberapa pemikir bahkan pernah mengkaji nilai budaya dan akuntansi kedalam konteks tauhid. Pelaporan yang hanya menyajikan *private costs and benefits* jelas mengakibatkan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi bias, menjadi terlalu egoistik. Oleh karena itu, ketimpangan yang ada di akuntansi modern perlu diperbaiki dengan cara memadukan dengan sifat lain, sebagaimana kita pahami dari nilai filsafat *manunggaling kawulo gusti* (Triuwono, 2006: 370).

Paling tidak konsep yang disuguhkan melalui penggalan budaya adat Bali dalam penafsiran akuntansi di atas pada hakekatnya adalah simbol menyama braya yang di dasari oleh filosofi *Tat Twan Asi* (Dia adalah engkau/kamu) dalam adat istiadat Bali. Konteks tersebut adalah pemaknaan sebagai ajaran kesesusaan yang tapa batas, dan identik dengan ajaran kemanusiaan (*humanisme*). *Tat Twan Asi* (Ia adalah engkau) sangat berkaitan dengan susila yang dalam babad Bali disebutkan mengandung makna bahwa: hidup segala mahluk sama, menolong orang lain berarti menolong diri kita sendiri, dan sebaliknya menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Sehingga jiwa sosial demikian perlu diresapi sebagai sinar tuntunan kesucian Tuhan dan sama sekali bukan atas dasar pamrih kebendaan.

Realitas yang materialistik bukan sebatas ilusi, tapi fakta empiris yang dapat kita temukan sehari-hari (Triyuwono 2006: 376). Manusia modern berorientasi pada dunia materi, dan sebaliknya, mengabaikan dunia non-materi. Dari beberapa konsep yang disampaikan oleh Triyuwono (2006); Burrell dan Morgan (1979); Nasr (1993) sesungguhnya menggambarkan bahwa realitas tertinggi adalah spiritual.

“The intellectual origin of the radical humanist paradigm can be traced back to the tenets of German Idealism and the Kantian notion that the ultimate reality of the universe is spiritual rather than material in nature” (Burrell dan Morgan 1979: 279)

Akuntansi sendiri tidak bisa lepas dari peranan budaya, bahwa akuntansi lahir dari budaya dan akuntansi adalah hasil cipta budaya. Menanggapi konsep tersebut, secara realitas hal ini terlihat dari pemahaman Ibu Widani selaku bendahara dalam pembangunan pura di daerah Tabanan, menyatakan :

“Peran serta dari keluarga besar *penyungsong* pura harus di jadikan barometer dari para pengurus pembangunan pura untuk mengelola keuangan secara transparan sebagai bentuk penghargaan bagi para donatur. Dengan kata lain tanggung jawab dan transparan menjadi tolak ukur dalam pengelolaanya”.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Gusti:

“Dalam pembangunan pura akan menunjukkan peran budaya yang sangat besar, yaitu budaya *Tat Twam Asi*, yang menunjukkan saling membantu dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan tanggungjawab kepada leluhur dan Tuhan, di samping itu juga akan dipertanggungjawabkan dalam suatu penyajian laporan keuangan yang sederhana sebagai bukti pertanggungjawaban untuk semua keluarga besar, sehingga tercipta transparansi dan keterbukaan bagi semua orang, yang akan mengurangi rasa curiga antar sesama.”

Argumen beliau di atas menunjukkan gambaran pengelolaan keuangan dengan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka pada para penyumbang. Hal ini menjadi penting mengingat *piturunan* dan *punia* yang diterima dan di kelola dalam pembangunan dengan tujuan sebagai tempat peribadatan. Hal ini juga memiliki relevansi dengan simbol agama dan budaya yang dianut masyarakat Bali.

Informasi yang akurat dan andal akan berguna bagi pengurus dan warga *penyungsong* dalam pengambilan keputusan. Efektivitas pengelolaan dana terkait dengan kesesuaian alokasi penggunaan dana dan juga terkait dengan tujuan pembangunan pura.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Tjokorda Bagus Rai:

“Dalam pembangunan pura di tempat saya pencatatan dana *piturunan* dan dana *punia* akan dilaporkan setiap minggu dalam rapat. Rapat tersebut akan membahas laporan pendanaan yang ada, baik untuk penerimaan dan pengeluaran. Sehingga keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik dan proses pencatatan keuangannya dengan membuat laporan realisasi penggunaan dana”.

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh bapak Gusti:

“...di tempat saya pada saat pembangunan pura pencatatan sebesar pengeluaran yang di keluarkan dalam proses pembangunan akan dilaporkan setiap sepuluh hari. Semua laporan pengeluaran akan membantu untuk mengetahui berapa jumlah uang kas yang masih tersisa, jika kas yang ada sudah sangat kecil, maka *piturunan* akan di tarik kembali. Dengan pencatatan ini akan sangat membantu bagi warga *penyungsong* dalam menyiapkan segala sesuatu. Dengan adanya pencatatan akuntansi ini juga akan membantu *memplanning* uang yang tersisa.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Ibu Desak:

“...tentunya semua pencatatan penerimaan uang *piturunan* dan *punia* yang disumbangkan dalam bentuk selain uang akan tetap dicatat oleh bendahara, dan akan dilaporkan kepada semua warga, tidak hanya dalam hal penerimaan saja, begitu juga untuk semua pengeluaran yang terjadi akan secara rutin dilaporkan. Semua pencatatan tersebut kami percayakan pada bendahara kami, dan setiap satu minggu sekali bendahara kami akan melaporkan pada kami dan dicetak untuk kami semua. Sehingga transparansi keuangan di tempat kami sangat jelas, dan sangat tertata dengan baik, sehingga akan dapat mengurangi kecurigaan dari semua pihak, karena semua penerimaan dan pengeluaran sudah tercatat dengan rapi.”

Perwujudan format laporan akuntansi oleh bendahara pura. Penyumbang yang berasal dari pribadi-pribadi dan atau organisasi cenderung ingin mengetahui seberapa besar kontribusi dari bantuan uang yang mereka sumbangkan dapat membantu kegiatan sosial keagamaan itu. Bertolak dari kebutuhan tersebut maka diperlukan akuntabilitas dan transparansi kejelasan dalam penggunaan dana itu, sehingga model pencatatan akuntansi atas kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi pada laba menjadi relevan untuk diterapkan pada pelaporan keuangan kegiatan pembangunan pura tersebut. Hal ini menuntut pihak panitia yang bertugas selaku bendahara akan membuat laporan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran tersebut ke semua pihak baik perorangan maupun non perorangan yang memberi donasi.

Bendahara pura akan melaporkan dan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan kebutuhan pengeluaran-pengeluaran atas pembangunan pura tersebut. Total penerimaan yang diperoleh dari sumbangan umat *penyung-sung* akan dicatat pada buku penerimaan sumbangan untuk kemudian secara rutin dan terjadwal dilaporkan dalam pertemuan rapat *progress* pembangunan dan pada saat terakhir proses penyelesaian pembangunan pura akan disampaikan secara utuh dan terperinci kepada pihak-pihak yang menyum-

bang mengenai total penerimaan dan pengeluaran. Apabila terdapat sisa saldo akhir ditunjukkan fisik uangnya. Apabila bukti kas terdapat dalam rekening tabungan bank akan di *print* saldo akhir yang tertera pada rekening tabungan yang dibuka khusus untuk tujuan menampung mutasi masuk dan keluarnya uang pembangunan pura tersebut. Informasi terperinci sebagai lampiran juga disertakan berisi catatan nama-nama para donatur beserta jumlah yang disumbangkan dan juga catatan terperinci atas pengeluaran yang terdiri atas pengeluaran untuk material bangunan, upah tukang dan buruh bangunan, konsumsi dan masih banyak lagi lainnya yang penting untuk dirinci dan diungkap dalam pelaporan keuangan oleh bendahara.

Pernyataan di atas didukung oleh panitia selaku bendahara dari Ibu Cok Anik:

“...saya selaku bendahara akan melaporkan hasil sumbangan yang saya peroleh dalam kurun waktu satu bulan. Tidak hanya penerimaan saja saya juga melaporkan semua pengeluaran. Semua panitia yang berasal dari kasta apapun dalam suatu pembangunan akan melaporkan hal yang sama pada saat dilaksanakan rapat, kalau tidak ada rapat mereka akan membuat laporan pembukuan dalam bentuk *print* dan ada yang membuat laporan keuangan yang hanya menunjukkan jumlah yang nantinya akan dikirimkan lewat SMS. Saya rasa semua panitia pembangunan pura selaku bendahara baik dari kasta apapun akan membuat laporan keuangan yang sama bagi seluruh anggota keluarga besar dari *penyung-sung* pura tersebut. Laporan keuangan ini saya susun seperti format laporan rugi laba. Untuk penyusunannya saya total semua penerimaan dari semua warga dan saya kurangi dengan semua pengeluaran yang terjadi”

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bu Putu:

“...panitia pembangunan pura di tempat kami akan selalu menyusun laporan penerimaan dengan baik, dan kami seluruh kepala

keluarga telah menyepakati untuk membatasi penggunaan dana hanya untuk pembangunan pura. Untuk dana pelaksanaan ngen-teg linggihnya akan ditarik kembali. Sehingga akan terlihat adanya pembatasan penggunaan dana tersebut. Penerimaan sumbangan hanya untuk membiaya semua bahan material untuk pembangunan pura dan biaya tukang saja. Sehingga semua penerimaan akan teralokasi untuk pembangunan”.

Tidak jauh beda dengan pernyataan Bapak Dewa yang menyatakan:

“Semua penerimaan akan kami alokasi untuk bahan pembangunan pura, seperti: kayu, ijuk, batu bata, pasir, semen, pembayaran tukang (untuk tukang ukir dan tukang bangunan). Sehingga dana yang ada akan terpusat penggunaannya, dan memberikan transparansi yang sangat baik.”

Argumen beliau di atas menunjukkan kesadaran pihak panitia pelaksana pembangunan pura untuk melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan berkala sebagai wujud pertanggung jawaban mereka dalam mengelola keuangan selama proyek tersebut berlangsung. Semakin besar dan megah pura yang dibangun semakin besar pula jumlah pengeluaran yang dikeluarkan dalam penyelesaian pembangunan tempat peribadatan tersebut. Masing-masing kasta juga akan memiliki ciri dan karakteristik yang tersendiri terutama pada tingkatan keturunan Brahmana dimana struktur dan jumlah bangunan pura yang terdapat dalam lingkungan pura lebih banyak dan kompleks sesuai dengan adat-istiadat serta fungsi dari bangunan pura tersebut yang terus dilestarikan sejak periode awal nenek moyang mereka.

Selain dari sisi kasta, tingkatan sosial ekonomi umat *penyungsurung* juga dapat memengaruhi besarnya keinginan untuk membangun pura keluarga yang megah dengan mempercantik bangunan utama dan bangunan pendukung pura, melalui penggunaan ukiran-ukiran yang terbuat dari bahan-bahan material bermutu dan bernilai tinggi, sehingga jumlah *piturunan* yang dikenakan kepada umat relatif besar dan mereka menyadari dikarenakan kemampuan ekonomi

mereka yang tinggi dapat dipersembahkan untuk mempercantik bangunan pura milik mereka. Sedangkan masyarakat dengan tingkatan sosial ekonomi menengah kecenderungan untuk membangun pura ataupun merenovasi pura terbatas pada kemampuan ekonomi yang mereka miliki, tanpa merasa bahwa bangunan tersebut menjadi tidak layak sebagai tempat mereka melakukan persembahyangan setiap harinya. Hal ini didorong oleh keyakinan baik sisi kasta brahmana sampai sudra, srata sosial ekonomi tinggi ataupun rendah tidak memandang bahwa bangunan pura yang berbiaya besar lebih memberikan pandangan sebagai umat beragama yang paling taat atau patuh menjalankan ajaran-ajaran agamanya, dikarenakan pengetahuan mereka sebagai umat, bahwa Hyang Widhi bersifat universal dan Maha Tahu dimanapun umat menyembah-NYA Beliau selalu ada.

Berikut merupakan gambaran bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan PSAK 45 yang dapat menjadi acuan dan sudah diterapkan oleh organisasi nirlaba bidang keagamaan sebagai wujud melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik yaitu akuntabel dan transparan. Bendahara dapat akan membuat laporan yang menginformasikan jumlah saldo awal penerimaan dan rincian pengeluaran serta menunjukkan sisa saldo yang belum digunakan secara sederhana dalam pengelolaan keuangannya, tanpa mengurangi kualitas laporan dengan menunjukkan otorisasi dari panitia pembangunan pura sebagai pihak yang diberi tanggungjawab untuk mengelola dana hasil *piturunan*, tampilan dalam tabel 1.

Bendahara juga dapat membuat laporan realisasi anggaran untuk masing-masing periode, untuk tujuan memperoleh dasar bagi keputusan selanjutnya bilamana kebutuhan akan biaya pembangunan pura menyimpang dari limit anggaran yang ditetapkan dan hal ini penting untuk dilaporkan ke pada para *penyungsurung* pura. Adapun laporan realisasi anggarannya disajikan pada tabel 2.

Akuntansi seperti ini akan menjadi bentuk suatu pertanggungjawaban dari proses pembangunan pura tersebut. Akuntansi ini juga bertujuan untuk memberikan informasi yang di butuhkan untuk pengambilan keputusan. Misalnya, pengeluaran bahan apa yang dibutuhkan paling banyak dan memiliki jumlah pengeluaran yang paling besar, serta bagaimana pengalokasian

dana untuk semua pengeluaran dalam pembangunan pura tersebut. Proses pencatatan akuntansi ini akan menggunakan basis kas, yakni mengakui penerimaan dan pengeluaran pada saat kas diterima dan dibayarkan.

Mengacu pada standar akuntansi keuangan untuk organisasi nirlaba, dijabarkan bahwa sumbangan atau iuran dari donatur adalah merupakan sumber penerimaan pokok yang diperuntukkan untuk membiayai program-program organisasi nirlaba yang bersifat terikat dan atau tidak terikat dan pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sifat donasi yang diistilahkan terikat dan atau tidak terikat memiliki pengertian sesuai dengan konsep organisasi nirlaba, makna terikat disini menunjukkan terdapat pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan penggunaan untuk masing-masing pembiayaan. Pembatasan tersebut berasal dari perjanjian dari pihak donatur pada saat menyerahkan sumbangan tersebut.

Pernyataan di atas umumnya juga terjadi dalam pembangunan pura di Bali, yang didukung oleh Bu Made

“...kami sebagai keluarga besar disini akan selalu bahu membahu dalam pemugaran pura. Semua penerimaan dari *piturunan* dan sumbangan *punia* yang diperoleh akan digunakan untuk pengelu-

aran-pengeluaran dalam rangka pembangunan pura tersebut, baik untuk pembelian bahan-bahan bangunan, ukiran-ukiran kayu, pembayaran tukang dan sampai prosesi ngeteg *linggih* mengupacarai bangunan baru tersebut yang semuanya membutuhkan semangat gotong royong dari seluruh *penyungsong* pura. *Tiang* (saya) berikan contoh semangat bahu membahu dari para *penyungsong*, selain semua biaya untuk pembangunan tersebut tidak semuanya dibiayai dari penerimaan *piturunan*. Untuk konsumsi para *pengayah* dan tukang bangunan diperoleh dari tiap keluarga secara sadar akan menyumbangkan makanan atau kue-kue pasar untuk tiap harinya dan ada pula yang menyumbangkan minuman kopi atau teh. Begitulah pada umumnya otomatis, spontan dilakukan oleh warga *penyungsong* pura yang sedang dibangun dari jaman dahulu generasi tua-muda bahkan anak-anak membantu dengan gembira“

Wujud akuntansi pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan yang disusun akan

Tabel 1. Laporan Aktivitas Pembangunan Pura

Laporan Aktivitas Pembangunan Pura “A” Alamat Pura Untuk periode dari tanggal sam pai dengan tanggal		
Saldo awal		xxxx
Penerimaan :		
Sumbangan	<u>xxxx</u>	
Total Penerimaan Sumbangan		xxxx
Pengeluaran :		
Biaya Bahan	xxxx	
Biaya Jasa Tukang	<u>xxxx +</u>	
Total Pengeluaran		<u>(xxxx)</u>
Saldo akhir		<u>xxxx</u>
Desa “x” Kab.Tabanan, Tgl/bln/thn		
Dibuat,	Diketahui,	Disetujui,
Bendahara	Sekretaris	Ketua

Tabel 2. Contoh Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran			
[Nama Pura]			
[Alamat]			
Untuk perioda dari [tanggal] sampai dengan [tanggal]			
Penerimaan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Penerimaan dari Aktivitas 1	Xxx	Xxx	Xxx
Penerimaan dari Aktivitas 2			
Pengeluaran	Xxx	Xxx	Xxx
<i>Aktivitas 1:</i>			
Biaya A			
Biaya B			
<i>Aktivitas 2:</i>			
Biaya B			
Biaya C			
Biaya D			
Selisih Penerimaan dan Pengeluaran			xx

memudahkan para umat *penyungsur* pura dalam mengetahui kebutuhan *piturunan* dan kerelaan akan *punianya*. Sehingga mereka akan merasakan kepuasan religius terhadap apa yang telah disumbangkan atau menjadi dharma bakti sebagai umat *penyungsur* pura serta sebagai perwujudan perilaku gotong royong dalam konsep filosofis *menyama braya* atau dikenal sebagai pengakuan bahwa semuanya adalah satu keluarga baik yang berasal dari berbagai macam suku dan agama yang berbeda dengan *penyungsur* itu sendiri yang selalu menjadi dasar kehidupan masyarakat adat di Bali, dan sebagai wujud sembah bakti mereka pada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Umat *penyungsur* pura lebih mengartikan *piturunan* dan dana *punia* yang dikorbankan bertujuan mulia bagi kehidupan beragama mereka di dunia dan sebagai media komunikasi kepada Sang Pencipta, sehingga tidak pernah timbul permasalahan atau konflik diantara mereka yang diakibatkan oleh jumlah *piturunan* yang ditetapkan bersama dalam rapat-rapat. Panitia pembangunan pura pun tidak merasa terbebani dengan tanggung jawab mengelola proyek pembangunan pura tersebut, bahkan dengan kesadaran akan prinsip-prinsip akuntabel dan transparan, panitia akan membuat dan melaporkan pengelolaan keuangan hasil *piturunan*.

Hal yang sama juga di temukan pada hasil penelitian Widati *et. al.* (2011) yang menyatakan bahwa "*Aisyiyah*" melakukan usaha untuk mendapatkan laba untuk ke-

pentingan organisasi. Disamping itu, Widati *et. al.* juga menemukan "amal usaha" merupakan media beribadah kepada Tuhan, dan merupakan usaha untuk mendapatkan dana. Usaha ekonomi ini membutuhkan akuntansi sebagai alat atau media akuntabilitas dan transparansi.

SIMPULAN

Piturunan atau iuran yang dibayarkan oleh masing-masing *penyungsur* (umat) pura, baik yang berasal dari kasta brahmana dan kasta lainnya serta pada tingkatan sosial ekonomi yang tinggi maupun yang rendah memiliki perbedaan pada jumlah yang disumbangkan dikarenakan kondisi-kondisi alami yang memengaruhi, akan tetapi bermakna tidak berbeda yang pada kenyataannya umat sebagai penyumbang memiliki esensi bahwa *piturunan* tidak hanya dilihat dari nominal rupiah yang disumbangkan tapi juga dimaknai sebagai bagian dari kesadaran religius penyumbang akan tanggungjawabnya selaku pemeluk agama kepada penciptanya. Itikad baik dan tulus ikhlas dalam memberikan *piturunan* dalam proses pembangunan atau pun pemugaran pura merupakan kebiasaan turun temurun (*local wisdom*) masyarakat Bali dan masyarakat umumnya di Nusantara yang memegang filosofi gotong-royong untuk menyelesaikan tujuan bersama. Para informan dari penelitian ini memiliki interpretasi yang sama terkait *piturunan*, walaupun memiliki latar belakang strata sosial ekonomi

ataupun penggolongan keturunan/sistem kasta yang berbeda. Mereka akan memberikan *piturunan* secara sukarela dan ikhlas yang merupakan salah satu bentuk darma bakti mereka kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Bilamana diperhatikan berdasarkan tingkatan dari keturunan/kasta seseorang dalam pembangunan pura, orang tersebut akan mengeluarkan biaya pembangunan pura yang berbeda dengan kasta-kasta lainnya. Sebagai ilustrasi kasta brahmana yang umumnya di Bali memiliki peran sebagai pemimping agama tertinggi yang disebut Ida Pedanda, memiliki struktur pembangunan maupun proses pemugaran pura yang lebih kompleks, sehingga mereka akan mengeluarkan biaya pembangunan yang relatif lebih besar dibandingkan pada kasta lainnya. Begitupula umumnya pada tingkatan sosial yang tinggi membangun tempat ibadah/pura mereka menjadi lebih megah dengan ukiran-ukiran yang penuh, hal ini dikarenakan kemampuan penghasilan ekonomi mereka yang tinggi berpengaruh pada keinginan untuk menunjukkan kemampuan sosialnya dibandingkan masyarakat lainnya yang mana hal tersebut tidak terkait dengan anjuran agama ataupun cermin dari silsilah keturunan berdasarkan kasta. Perilaku mengeluarkan biaya yang relatif besar dalam membangun sebuah tempat ibadah atau pura berdasarkan penggalian informasi secara mendalam dari para informan tidak menyebabkan adanya beban ekonomi, dinyatakan dalam hasil wawancara keikhlasan untuk gotong-royong berkontribusi membayar *piturunan* pembangunan pura menjadi bagian dari ibadah atau dharma agama individu.

Akuntabilitas dan transparansi pelaporan penggunaan dana *piturunan* umat, perkembangan pada era keterbukaan saat ini, telah menjadi keharusan yang tidak hanya menjangkau organisasi yang berorientasi pada laba (*profit oriented*) akan tetapi organisasi/komunitas sosial kemasyarakatan yang menghimpun dana publik seperti zakat, perpuluhan, *punia*, ataupun sumbangan lainnya yang bersifat sosial dimana pertanggungjawaban pengelolaan dana tersebut relevan dan baik bagi peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga/orang-orang sosial tersebut. Untuk itu media yang menunjang akuntabilitas dan transparansi adalah akuntansi sederhana berupa catatan penerimaan dan pengeluaran dimana Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Stan-

dar Akuntansi Keuangan No.45 yang dapat menjadi acuan bagi lembaga/orang-orang nirlaba untuk menyusun laporan keuangan dengan membuat pedoman-pedoman kebijakan yang khusus yang menjadi karakteristik masing-masing organisasi nirlaba tersebut. Hasil dari wawancara dengan informan juga diperoleh informasi bahwa yang sudah dilakukan panitia pembangunan pura telah berjalan dengan rapi dan baik. Umumnya, mereka akan mencatat dalam laporan yang paling sederhana untuk menunjukkan besaran penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam kurun waktu tertentu selama proses pembangunan pura tersebut. Proses pencatatan yang dilakukan pada umumnya dengan mencatat kedalam laporan aktivitas dan laporan realisasi anggaran. Untuk semua kasta dan strata sosial yang ada sudah melakukan proses pencatatan akuntansinya dengan sederhana. Dalam hal ini, mereka sangat paham akan kegunaan dari laporan keuangan yang bisa digunakan sebagai pengendali keuangan, dan sebagai pertanggungjawab mereka pada para penyumbang maupun para donatur yang sudah memberikan kontribusinya pada proses pembangunan pura tersebut.

Saran yang dapat diusulkan dalam sistem sosial religius dan budaya masyarakat memandang peran akuntansi sebagai media informasi keuangan telah berkembang melebihi kebutuhan bagi penggunaannya. Transparansi dan akuntabilitas keuangan yang mampu ditunjukkan melalui pelaporan akuntansi masih perlu mendapatkan perhatian mendalam dan komprehensif dari dewan standar akuntansi sebagaimana sudah terakomodasi dalam PSAK 45 Akuntansi Organisasi Nirlaba, untuk dapat terus dikembangkan dan dimasyarakatkan untuk tujuan akuntabilitas dan kesederhanaan dalam penerapannya serta layak untuk diaudit agar kualitas dari akuntansi pertanggungjawaban organisasi nirlaba meningkat.

DAFTAR RUJUKAN

- Badu, R. S., dan I.R. Hambali 2014. *Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi Akuntabilitas Dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo)*. Universitas Negeri Gorontalo
- Burrell, G., dan G. Morgan. 1979. *Sociological Paradigms and Organisational*

- Analysis*. Ashgate Publishing Limited. England. Retrieved from <http://www.ashgate.com>
- Bhagavad Gita. XVII.20.
- Chua, W. F. 1986. "Radical Development in Accounting Thought". *The Accounting Review*, Vol. LXI, No.4, hlm 601-632.
- Huda, N., D. Anggraini, N. Rini, K. Hudori, dan Y. Mardoni. 2014. Akuntabilitas sebagai sebuah solusi pengelolaan wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 5, No. 3, hlm 485-497.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. IAI. Jakarta
- Irvine, H. J. 2005. "Balancing money and mission in a local church budget". *Scholl of Accounting and Finance, University of Wollongong. Australia Research Article*, Vol. 18, No. 2, hlm 211-237.
- Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Penerbit Yayasan Rumah Peneleh. Malang.
- Muhajir, N. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi IV). Penerbit Rajawali Press.
- Putra, K. 2012. Struktur dan Makna Ora di Bali berdasarkan Asta Kosala-Kosali. Diunduh tanggal 12 Desember 2015. <<http://www.komangputra.com/stuktur-makna-pura-di-bali-berdasarkan-asta-kosala-kosali.html>>
- Ruslan, M. dan Alimuddin. 2012. "Makrifat Akuntansi, Determinasi Puncak Perjalanan Spritualitas Akuntansi: Suatu Tinjauan Ontologis". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 3 No. 3, hlm 334-501.
- Satyawan, M. D., dan L. Venusita. 2014. "Double Duties: Pajak dan Sumbangan Keagamaan dalam Perspektif Masyarakat Hindu Bali (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umat Hindu Perantauan Asal Bali di Sektor Tropodo Sidoarjo)". *Investasi*, Vol. 10, No. 2, hlm 75-87.
- Setiawan, A. R. 2011. "Tinjauan Paradigma Penelitian: Merayakan Keragaman Pengembangan Ilmu Akuntansi". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 2, No. 3, hlm 402-417.
- Suryono, A., dan Carrisa, L. 2015. *Pelestarian Kearifan Lokal dalam Arsitektur Pada Resort Royal Pita Maha di Ubud - Bali*.
- Sugriwa, I. G. B. 1956. *Semreti Budaya Hindu Bali*. Bali: Pustaka Balimas
- Triyuwono, I. 2006. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori*. Rajawali Press.
- Wararuci, B. 2016. *Kitab Sarasamuscaya*. Retrieved from <<https://dongengbudaya.wordpress.com>>
- Widati, S., I. Triyuwono, dan E.G. Sukoharsono. 2011. "Wujud, Makna dan Akuntabilitas "Amal Usaha" Sebagai Aset Ekonomi Organisasi Religius Feminis". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 2, No. 3, hlm 369-540.
- Widyani, S.M.N., et. al. 2015. "Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Lembaga Lokal Subak dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Pedesaan (Studi Kasus pada Subak Tabola, Desa Pakraman Tabola, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem)". *e-journal Jurusan Akuntansi Undiksha*, Vol. 1, No. 3.
- Wiyana, I.B.G. 2012. "Konsep-Konsep Ajaran Agama Hindu dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup "Wana Kertih." Diunduh pada tanggal 12 Desember 2015 <<https://ibgwiyana.wordpress.com/2012/04/05/konsep-konsep-ajaran-agama-hindu-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup-wana-kertih-2/>>.